DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Abdurrahman, 1983, *Tebaran Pikiran Mengenai Hukum Agraria*, Penerbit Alumni. Bandung.
- Ali, Zainuddin, 2005, Sosiologi Hukum. Sinar Grafika. Jakarta.
- A.P, Parlindungan, *Hak Pengelolaan Menurut Sistem UUPA*, Penerbit Mandar Maju, Bandung. 1989
- Arikunto, Suharsimi, 1998, *Prosedur Penelitian, SuatuPendekatan Praktik.* Penerbit Rineka Cipta. Jakarta.
- _____, 1990, Komentar atas UUPA, Penerbit Alumni, Bandung.
- ______, 1990, *Pendaftaran Tanah di Indonesia*, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- ______, 1991, Landreform di Indonesia Suatu Perbandingan, Penerbit Mandar Maju, Bandung.
- Bagus Lorens, 2005 *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Harsono, Budi, 2003, *UUPA Bagian Pertama Jilid Pertama*, Penerbit Kelompok Belajar "ESA", Jakarta.
- Hasni. 2008. "Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah". Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Maleong, Lexy J, 2005, *Metode Penelitian Sosial*: Edisi Revisi, Bandung, Remaja Rosdakarya.
- Ruchiyat, Eddy, 1986, *Politik Pertanahan Sebelum dan Sesudah Berlakunya UUPA*, Penerbit Alumni, Bandung.

- Sitorus O. 2005. "Pemberian Hak Atas Tanah Yang Berwawasan Lingkungan". dalam Bhumi Nomor 17 Tahun 6, Februari 2005. Yogyakarta: STPN.
- Sitorus O. 2004. "*Kapita Selekta Perbandingan Hukum Tanah*". Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Sitorus, O. dan H.M Zaki S. 2006. "Hukum Agraria Di Indonesia Konsep Dasar dan Implementasi". Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia.
- Silalahi, S.B. (1991). Tanah dan Pembangunan. STPN, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Metode Penelitian Sosial*. Bina Rupa Aksara. Jakarta.
- Wahid, Muchtar. 2008, *Memaknai Kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah*. Republika. Jakarta.
- www.tatagunatanah.blogspot.com. "Landasan Hukum Tata Guna Tanah".
 - 7 Februari 2009

B. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN LAIN

- 1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA).
- Undang Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman.
- 4) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang.
- 6) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1997 Pasal 10 tentang Pola Pemanfaatan Ruang Wilayah Nasional.
- 8) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 Penatagunaan Tanah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

10) Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan

Lindung.

C. SUMBER LAIN

Badan Pusat Satistik, Tanggamus Dalam Angka, 2009.

Dinas Kelautan dan Perikanan, Penyusunan Rencan Strategis Wilayah Pesisir

dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Lampung, 2010

Dinas Kelautan dan Perikanan, Rencana Tata Ruang Pesisir Teluk Lampung

dan Teluk Semangka, 2003

Pemerintah Provinsi Lampung, Atlas Sumber Daya Wilayah Pesisir Provinsi

Lampung,1999

Media: Cetak, Website, Goegle